

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEMINJAMAN  
UANG BAGI YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Pada  
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh  
**Oxsha Julian**  
NPM : 1221030070

**Jurusan : Mu'amalah**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEMINJAMAN  
UANG BAGI YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI (Studi Pada  
Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh  
**Oxsha Julian**

**NPM : 1221030070**

**Jurusan : Mu'amalah**

**Pembimbing I** : Drs.Haryanto H, M.H  
**Pembimbing II** : Relit Nur Edi, Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2018 M**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kasus Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggurikan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya. Dijelaskan bahwa koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Baik itu berupa uang ataupun barang, dengan untuk sama-sama saling menguntungkan. Namun yang menjadi permasalahan diatas bagaimanakah hukum peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Sistem Peminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera ? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang bagi orang yang bukan anggota koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam sejahtera. Serta untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang larangan peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam sejahtera.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan, yaitu koperasi simpan pinjam sejahtera, Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan jalan melakukan studi perpustakaan, yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, kitab-kitab *fiqh muamalah*, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sistem peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi simpan pinjam sejahtera Bandar Lampung adalah dengan cara menggunakan nama anggota aktif di koperasi simpan pinjam sejahtera atau dengan kata lain menggunakan kepercayaan yang dijamin oleh keanggotaan aktif pada koperasi tersebut. Kemudian menurut undang-undang koperasi tahun 2012, peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi tidak diperbolehkan, akan tetapi dari segi hukum islam, peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi diperbolehkan berdasarkan QS. Al-Maidah: 2 tentang tolong menolong sesama manusia



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin, Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  
LARANGAN PEMINJAMAN UANG BAGI  
YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI (Studi  
Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)**

**Nama : Oxsha Julian**

**NPM : 1221030070**

**Jurusan : Muamalah**

**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I.

Pembimbing II.

**Drs. Haryanto H., M.H**

**NIP. 195612051983031002**

**Relit Nur Eki, Ag., M.Kom.I**

**NIP. 196901051998031003**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah**

**Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S. Ag., M.H.**

**NIP. 197208262003121002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Bandar Lampung Telp. 0721 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEMINJAMAN UANG BAGI YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI** (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera), Disusun oleh : **Oxsha Julian**, NPM : **1221030070**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/tanggal : Selasa, 04 September 2018.

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Dr. H. A. Khumaedi Ja'far, S. Ag., M.H.** (.....)

**Sekretaris : Herma Maraliza, S.E.I. M.E.Sy.** (.....)

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.** (.....)

**Penguji II : Drs. Haryanto H, M.H** (.....)

**Dekan Fakultas Syariah  
Universita Islam Negeri Raden Intan Lampung**

**Dr. Mamsyah, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP.197009011997031002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”. (QS. al-Maidah : 2).<sup>1</sup>



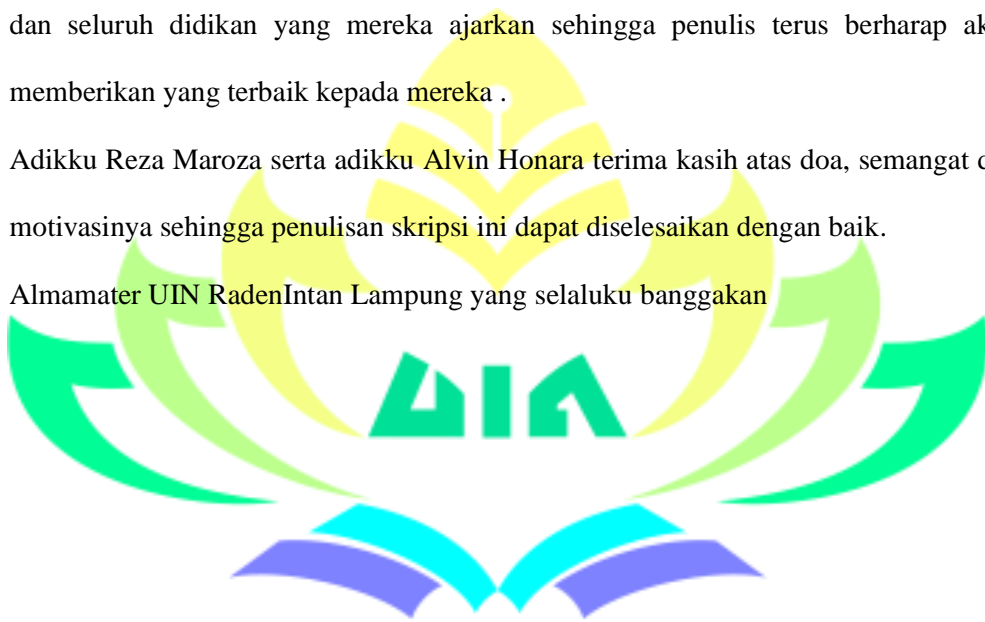
---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. AL-Quran dan Terjemahnya. Jakarta:YPP/Penafsiran AL-Quran

## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, ayahanda dan ibundaku (Hokman Wasir dan Nasriah) tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat, teladan, motivasi, dukungan moril dan seluruh didikan yang mereka ajarkan sehingga penulis terus berharap akan memberikan yang terbaik kepada mereka .
2. Adikku Reza Maroza serta adikku Alvin Honara terima kasih atas doa, semangat dan motivasinya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Almamater UIN RadenIntan Lampung yang selaluku banggakan



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Juli 1995 dan dianugerahi sebuahnama oleh ayahandanya dan ibundanya yaitu Oxsha Julian. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hokman Wasir dan Ibu Nasriah.

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah :

1. Sekolah Dasar di SDN 2 Perumnas Way Kandistamat dan berijazah pada tahun 2006.
2. Sekolah Menengah Pertama SMP N 19 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2009
3. Sekolah Menengah Atas SMAN 15 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) RadenIntan Lampung Program Strata 1 (S1) Jurusan Muamalah kemudian beralih status menjadi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) Program Strata 1 (S1) Jurusan Muamalah.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEMINJAMAN UANG BAGI ORANG YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI” (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bandar Lampung ), dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang ilmu Syari'ah.

Patut disadari dengan bantuan, serta arahan dan bimbingan dari semua pihak skripsi yang sederhana ini dalam proses penyelesaian tak lupa dihaturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Dr. Alamsyah, S.Ag. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Drs.Haryanto H, M.H dan Relit Nur Edi, Ag., M.Kom.I selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini terselesaikan.
3. Dr. H.A Khumeidi Ja'far, S.Ag, M.H dan Khairuddin M.Si selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Mu'amalah.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberi ilmu, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
5. Semua guru-guruku yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis hingga terselesaikannya tugas akhir ini.
6. Dewan Pimpinan beserta Jajaran Staf Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang telah membantu terselesainya tugas akhir
7. Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera terima kasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan Pak Ihsan selaku Pengawas Koperasi serta segenap jajaran staff kantor, terima kasih atas bimbingan serta ilmunya selama penulis melakukan penelitian.
8. Sahabatku tercinta Arif, Annisa, Gesta, Anggun, Adek, Ade Haciko, Alek, Iyan, Iyon, Ayu, Ali, Putri, Ayu, Anggi terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan sampai detik ini
9. Teman-teman angkatan 2012, kelas Mu'amalah A dan Mu'amalah B.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-sara, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, Desember 2018

Penulis

**Oxsha Julian**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data .....	11
4. Populasi Dan Sampel.....	12
5. Teknik Pengolahan Data .....	13
6. Analisis Data .....	13

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Koperasi .....	15
1. Pengertian Koperasi.....	15
2. Dasar Hukum Koperasi .....	19
3. Dasar Hukum Koperasi Dalam Islam .....	21
4. Ketentuan Mendirikan Koperasi .....	24
a. Rapat Persiapan.....	24
b. Menyusun AD/ ART .....	26
c. Sumber Permodalan .....	28
d. Perjanjian Pinjam-meminjam .....	31

5. Jenis Koperasi.....	32
a. Koperasi Menurut Tingkatan.....	32
b. Koperasi Menurut Sifat Usaha .....	32
B. Koperasi Dalam Pandangan Islam.....	39
1. Pengertian Syirkah.....	39
2. Dasar Hukum Syirkah Inan .....	43
3. Macam-macam Syirkah.....	44
4. Syarat dan Rukun Syirkah .....	47
5. Pandangan Ulama Tentang Syirkah inan .....	48
6. Pinjaman Dalam Islam(Ariyah).....	49
C. Perbandingan Syirkah Dengan Koperasi .....	50

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	52
1. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera .....	52
2. Visi Dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.....	52
3. Struktur Organisasi .....	53
4. Produk Koperasi .....	56
5. Syarat Keanggotaan Koperasi .....	60
6. Tujuan dan Target Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.....	62
B. Praktik Peminjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.....	62

### **BAB IV ANALISIS DATA.....**

A. Sistem Peminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi ( Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera).....	66
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Peminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi ( Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera).....	68

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....**

1. Kesimpulan.....	71
2. Saran .....	73

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul proposal ini, yang berahir dengan kesalah pahaman, maka dengan ini penulis akan menjelaskan secara singkat apa yang sebenarnya menjadi maksud dari judul penelitian ini. Judul skripsi ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN PEMINJAMAN UANG BAGI ORANG YANG BUKAN ANGGOTA KOPERASI” (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bandar Lampung ), maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

Tinjauan adalah pendapat meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari sebagainya).<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang didasarkan 4 pilar sumber utama yaitu Al-Qur'an, Al-Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*. Definisi pembahasan yang paling mudah dapat memberikan pemahaman bahwa ketika umat islam sedang mencar solusi permasalahan hukum yang muncul, maka sumber hukum yang pertama dirujuk adalah ayat-ayat Alquran. Bila jawaban tidak terdapat di dalamnya kemudian merujuk ke sunnah, dan seterusnya ke *Ijma'* dan *Qiyas*.<sup>3</sup>

Pinjaman adalah suatu jenis hutang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan

---

<sup>2</sup>W.J.S.Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992.

<sup>3</sup> Syamsul Hilal, “*Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal AL-'ADALAH, Vol. 11, No.2, Juli, 2013, h. 151 (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/252>, (17 Desember 2018)



pinjaman uang. Seperti halnya instrumen hutang lainnya, suatu pinjaman memerlukan distribusi ulang aset keuangan seiring waktu antara peminjam (terhutang) dan penghutang (pemberi hutang). Peminjam awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi hutang yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk angsuran berkala, kepada pemberi hutang. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap hutang. Pihak peminjam dapat juga memperoleh batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.

Pengertian Anggota Koperasi menurut Hanel, anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (*supplier*), koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat.<sup>4</sup>

Jadi, tinjauan hukum islam tentang larangan peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari tahu bagaimana sistem peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota dan bagaimanakah dengan tinjauan hukum islamnya.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memiliki beberapa alasan tertentu yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah ini. Adapun alasan ini antara lain:

1. Secara Objektif

---

<sup>4</sup>Arifin Sitio, Halomoan Tamban, *Koperasi teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001)h. 34.

Koperasi adalah lembaga keuangan bukan bank yang berbentuk koperasi dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada para anggotanya dengan bunga yang serendah-rendahnya.<sup>5</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam uang, Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut koperasi kredit merupakan suatu bentuk koperasi yang berdiri sendiri dimana anggota-anggotanya adalah orang-orang atau badan-badan yang tergabung dalam koperasi tersebut. Mereka yang tidak terdaftar sebagai anggota tidak bisa menyimpan atau meminjam uang dari koperasi simpan pinjam.

Sesuai dengan judul skripsi ini, penulis akan membahas tentang bagaimana larangan pinjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi

## 2. Secara Subjektif

- a. Dalam skripsi ini, penulis didukung oleh data yang akurat yang terdapat di perpustakaan maupun yang diperoleh di lapangan sebagai bahan rujukan yang berhubungan dengan topik penelitian, sehingga diperkirakan dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- b. Ketersediaan data atau informasi yang penulis butuhkan terkait judul yang akan diteliti, baik data primer maupun data sekunder memiliki

---

<sup>5</sup>Kanaidi, SE., M. Si, *Koperasi dan UMKM koperasi Usaha Mikro kecil dan menengah*, Jakarta, 2001

kemudahan bahan referensi dan letak objek penelitian yang mudah dijangkau.

- c. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah.

### C. Latar Belakang Masalah

Dalam islam, koperasi termasuk dalam golongan Syirkah. *Syirkah* secara bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan satu sama lain. Syirkah adalah akad (Ikatan) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan maksud mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup> Koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam praktiknya berbeda dengan koperasi konvensional, salah satu perbedaannya terletak pada teknis operasionalnya saja. Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang berarti kerjasama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat kebersamaan.

Koperasi sebagai badan usaha, organisasi dan kegiatan usahanya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Karena prinsip koperasi merupakan garis-garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk

---

<sup>6</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam)*, (Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m), h. 197

melaksanakan nilai-nilai dalam praktek seperti (1) keanggotaan sukarela dan terbuka, (2) pengendalian oleh anggota secara demokratis, (4) partisipasi ekonomi anggota, (5) pendidikan, pelatihan dan informasi, (6) kerjasama diantara koperasi dan (7) kepedulian terhadap komunitas.<sup>7</sup>

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus Kumiai mengubah kumiai menjadi Koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha sesuai dengan azas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya yaitu :

1. Membentuk organisasi yang diberi Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI)
2. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati
3. Menetapkan gotong royong sebagai azas koperasi
4. Mengusahakan Koperasi Desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian
5. Mengusahakan berdirinya Bank Koperasi untuk mengorganisasi permodalan organisasi
6. Memperhebat dan memperluas pendidikan Koperasi di kalangan pengurus dan pegawai Koperasi di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muchdarsyah Sinungan, 1991, *Perkoperasian*, Bina Aksara Jakarta

<sup>8</sup> Panji Anoraga, S. E., M.M dan Dra. Ninik Widiyanti “*Dinamika Koperasi*”, Jakarta,

Pada periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka periode ini banyak koperasi macet. Namun demikian, pada periode ini sudah nampak adanya konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini, tepatnya tanggal 12 juli 1953 dalam kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain :

1. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI.
2. Menetapkan Pendidikan Koperasi sebagai satu pelajaran di sekolah.
3. Dr. Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan perkoperasian Indonesia.

Kata “Koperasi” secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No 79 tahun 1958. UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No 12 tahun 1967 dan diubah lagi menjadi UU No 25 tahun 1992. Kemudian UU di atas diperbaharui menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Koperasi merupakan suatu wadah yang dapat membantu masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah. Koperasi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat seperti bahan pokok yang tergolong murah dan juga ada koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang untuk masyarakat. Koperasi yang menawarkan peminjaman dan penyimpanan uang ini disebut koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat



merasa tenang dalam penyimpanan uangnya selain itu dalam hal peminjaman, masyarakat dapat melakukan peminjaman kepada pihak koperasi dengan bunga yang sangat kecil untuk membangun usaha atau bisnis yang diinginkan.

Dengan menempatkan sejumlah uangnya pada koperasi, para calon nasabah diberikan harapan nantinya akan mendapatkan pengembalian yang tinggi, tanpa harus bekerja keras keuntungan pun bisa didapat. Tawaran semacam ini sangat menggiurkan, karena orang akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan resikonya. Sehingga banyak masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.

Berdasarkan pengertian diatas, dijelaskan bahwa koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Baik itu berupa uang ataupun barang, dengan untuk sama-sama saling menguntungkan. Namun yang menjadi permasalahan diatas bagaimanakah hukum peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi.

Dalam penelitian penulis, yang menjadi permasalahan didalam koperasi pada objek penelitian penulis, bagaimanakah sistem peminjaman jika orang yang bukan anggota koperasi meminjam uang kepada badan koperasi yang notabennya terdiri dari anggota-anggota koperasi itu sendiri dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi.

Berdasarkan jenisnya, koperasi pada objek penelitian termasuk dalam koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dana yang terkumpul tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota koperasi.<sup>9</sup> Koperasi simpan pinjam berperan dalam membantu keperluan kredit para anggotanya dengan syarat yang ringan, kemudian mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan dana secara teratur sehingga membentuk modal sendiri, mendidik anggota agar hidup berhemat, dan menambah pengetahuan tentang koperasi.<sup>10</sup> Berdasarkan jenis dan peranan tersebut, koperasi simpan pinjam dapat bertahan dalam masyarakat

Dalam pra survey yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, penulis menemukan bahwa koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana kepada orang yang bukan anggota koperasi hanya dengan modal kepercayaan dari anggota koperasi.

Untuk itu Penulis tertarik mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Orang Yang Bukan Anggota Koperasi” (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bandar Lampung ).

#### **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup>Rudianto, *Akuntan Koperasi*, Edisi ke-2. Jakarta, 2010

<sup>10</sup>Rosnani Siregar, “Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan*, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2015

Berdasarkan latar belakang di atas, yang dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah SistemPeminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang bagi orang yang bukan anggota kopeasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam sejahtera.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang larangan peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi pada koperasi simpan pinjam sejahtera.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan pertimbangan anggota koperasi dan bukan anggota koperasi untuk melakukan transaksi peminjaman uang bagi orang yang bukan anggota koperasi.
2. Sebagai bahan referensi serta pengetahuan untuk masyarakat yang ingin meminjam uang kepada koperasi apakah terdapat hukum riba atau tidak dalam koperasi tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara yang bersumber dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.

Penelitian ini selain berjenis penelitian lapangan juga penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencari referensi tulisan lainnya yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

## 2. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, maka sumber data ini termasuk sumber data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab

pertanyaan riset (metode survey) atau penelitian benda (metode observasi).

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap narasumber, dalam hal ini yaitu nasabah yang meminjam uang di koperasi tetapi bukan sebagai anggota koperasi, transaksi peminjaman uang bagi yang bukan anggota koperasi hanya berdasarkan kepercayaan terhadap si peminjam dengan perantara anggota koperasi.

- b. Data Skunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku literature yang bersangkutan, internet, jurnal, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode interview dan wawancara.

#### **a. Interview dan Wawancara**

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang teliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode interview bebas terpimpin, yaitu tanya jawab terarah untuk mengumpulkan data yang relevan saja. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada anggota



koperasi simpan pinjam sejahtera dan peminjaman dilakukan oleh yang bukan anggota koperasi.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dituju, yakni koperasi simpan pinjam sejahtera, Bandar Lampung.
- c. Dokumentasi adalah barang-barang tertulis, dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menelaah secara tekun dan mencatat data yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas seperti buku-buku, arsip, dan data perusahaan yang mendukung penelitian. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yaitu berupa laporan data peminjaman pada koperasi.

#### **4. Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi adalah semua individu untuk data yang diperoleh dari sampel itu hendak di generalisasikan :<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, Bandar Lampung yang berjumlah 35 orang yang terkait dalam permasalahan skripsi ini.

##### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian populasi atau keseluruhan populasi yang di selidiki berjumlah 10 orang. Penelitian dalam menetapkan

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h.12

sampelnya menggunakan sampel *non random sampling*, artinya tidak semua individu yang peneliti jadikan sampel.<sup>12</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu langkah-langkah sebagai berikut.

### a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, sesuai/relevan dengan masalah. Dalam hal ini yang dilakukan pengecekan kembali hasil data wawancara dan studi pustaka apakah sudah lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

### b. Sistematisasi data (*systematizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini adalah mengelompokkan data secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasinya dan urutan masalahnya.<sup>13</sup>

## 6. Analisis Data

Selanjutnya setelah data terkumpul dan di bahas, kemudian data diperoleh dianalisis secara analisis *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan metode Deduktif yaitu dengan cara menjelaskan data-data umum atau teori-teori umum sebagai dasar untuk memudahkan peneliti dalam meneliti masalah ini metode ini digunakan untuk menganalisis

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Tintamas: Jakarta, 1985, h. 111

data-data yang umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus<sup>14</sup>.



---

<sup>14</sup>*Ibid*

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Koperasi

#### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini ber sama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama atau mencapai tujuan. Oleh karena itu, koperasi adalah “suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota;

Pentingnya koperasi dalam perekonomian telah diakui umum. Yang sering dilupakan adalah arti koperasi dalam meletakkan dasar demokrasi politik. Pada koperasi, prinsip-prinsip demokrasi telah dipraktikkan sebelum rakyat mengenal prinsip-prinsip demokrasi politik.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>15</sup> Pandji Anoraga, S. E., M. M., Dra. Ninik Widiyawati, *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2007. h.1

para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat kebersamaan.<sup>16</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi.<sup>17</sup> yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau oranisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan.

Sebagai ulama menyebut koperasi dengan *yyirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapa unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Mula-mula koperasi tumbuh pada awal abad ke 19, sebagai hasil spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme.

Koperasi tumbuh dan berkembang, terutama di Negara-negara yang menganut paham demokratis, karena di sini rakyatnya memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama.

---

<sup>16</sup>*Riba dalam bank, Koperasi, perseroan dan asuransi*, PT. Al-Ma'arif Bandung, 185 h.

<sup>17</sup>Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988, h. 148



Menurut Fuad Mohd. Fachruddin. Perjanjian perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama islam tanpa ada keragu-raguan apa pun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.<sup>18</sup>

Tolong menolong merupakan perbuatan yang terpuji menurut agama islam. Salah satu bentuk tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadi anggota koperasi merupakan salah satu bentuk perbuatan terpuji menurut agama islam.

Berdasarkan pengertian diatas, dijelaskan bahwa koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya. Baik itu berupa uang ataupun barang, dengan untuk sama-sama saling menguntungkan. Namun yang menjadi permasalahan diatas bagaimanakah hukum pinjam uang bagi orang bukan anggota koperasi.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berate bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.<sup>19</sup>

Namun kenyataannya, semakin lama gerakan Koperasi menempuh jalannya sendiri yang berbeda dengan gerakan sosialis baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya. Bahkan sekarang koperasi tumbuh subur di Negara-negara yang

---

<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Tintamas: Jakarta, 1985, h.

dikenal menganut sistem kapitalis, dan kemudian koperasi menjadi organisasi pengimbangan yang dapat melenyapkan keburukan-keburukan sistem kapitalisme itu sendiri.

Dalam bahasa koperasi Indonesia koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama secara kekeluargaan guna mensejahterakan seluruh anggotanya. Kata “Koperasi” secara resmi digunakan dalam undang-undang koperasi No 79 tahun 1958. UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-undang No 12 tahun 1967 dan diubah lagi menjadi UU No 25 tahun 1992. Kemudian UU tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Landasan kerja setiap koperasi yang adil di suatu Negara tentu saja berbeda-beda. Hal ini terjadi karena setiap Negara menyesuaikan landasan koperasi yang dimilikinya dengan keadaan sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Meskipun berbeda-beda, setiap koperasi di dunia memiliki landasan pokok yang disebut sebagai Lima Dasar Pokok. Lima dasar pokok ini dipergunakan sejak berdirinya koperasi pertama di Rochdale pada tahun 1844 lima dasar pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Koperasi dikemudikan oleh anggotanya sendiri.
- b) Tiap anggota mempunyai hak suara yang sama.
- c) Tiap orang dapat diterima menjadi anggota.
- d) Keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa mereka dalam memajukan koperasi.

e) Satu bagian tertentu dari keuntungan diperuntukan bagi pendidikan.

## 2. Dasar Hukum Koperasi

### 1) Alasan Yuridis

Alasan yuridis adalah alasan yang berpangkal pada dasar hukum yang menjamin mereka untuk dapat mendirikan usaha bersama dalam bentuk koperasi, beberapa undang-undang dasar dan Pasal tentang koperasi

#### a) Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 ayat (1)

Undang-undang dasar merupakan pedoman pokok hidup kita semua bangsa yang bernegara. Di dalamnya ditemukan pedoman-pedoman pokok dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu pedoman pokok dalam bidang ekonomi adalah Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya yang memberikan dasar hukum pertama untuk koperasi, yang berbunyi:

Pasal 33 ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” Dalam Pasal 33, tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dan di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### b) Pasal 33 ayat (4)

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

c) Undang-undang RI No. 25/1992

Undang-undang ini memberikan ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan perekonomian rakyat. Peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat. Untuk menyelesaikannya dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk menghadapi perkembangan lingkungan yang dinamis itu, dikeluarkan UU No. 25/1992 tentang perkoperasian. Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pembangunannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian, koperasi akan menjadi mantap, demokratis, otonomis, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usahanya dan berperan untuk dalam kehidupan ekonomi rakyat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kanaidi, S. E., M. Si, *Koperasi dan UMKM*, Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, Bandung, 2015

### 3. Dasar Hukum Koperasi Dalam Islam

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah sebagai berikut:

﴿وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُفَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَتَهُ أَنْ مَادَا وَدُؤْظَنَ هـ﴾  
﴿مَّا وَقَلِيلَ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا أَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ لِّيَنبَغِيَ الْخُلُطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِنَّ

Artinya “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah ini (QS. Shaad(38):24)”.<sup>21</sup>

Maksud kata (الْخُلُطَاءُ) pada pernyataan ayat diatas adalah mereka yang berserikat. *Syirkah* hukumnya Ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadist Nabi SAW berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap *Syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saatitu telah bermuamalah dengan cara *Syirkah* dan beliau pun membenarkannya. Dalam riwayat hadist qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>21</sup> *Ibid*

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا الثَّالِثُ الشَّرِيفُ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya “Sesungguhnya Allah SWT berfirman: aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya (tidak melindungi) (HR. Abu Dawud dan Hakim)”<sup>22</sup>

Dalam Agama Islam, kita dibenarkan dan dianjurkan secara individu untuk terus berusaha, baik itu setiap orang secara sendiri, maupun dengan bersama-sama berjamaah menggabungkan modal yang dimiliki, serta tenaga yang ada dalam bentuk syirkah atau perkongsian. Hal ini didasari oleh sebab semua usaha ataupun pekerjaan yang mendatangkan keuntungan bagi seseorang secara khusus, maupun masyarakat secara umumnya dengan kategori halal dan bermanfaat, sangat ditekankan untuk dibangun suatu kerjasama atau kegotongroyongan.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa bentuk kerjasama dan hubungan antar manusia, maka segi ekonomi sangatlah penting perannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua orang akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya kalau tidak adanya kerjasama antara satu dengan yang lain di antara masyarakat.

Makna kutipan “Allah sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat” adalah bahwa Allah bertindak sebagai saksi dalam transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang tersebut, sepanjang salah

---

<sup>22</sup>“HR. Abu Dawud”, *Kitab Al-Buyu dan Hakim No. 2936* dalam Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek* (Jakarta : Tazkia Cendikia, Maret 2001), Cet. Ke-1, h. 91

<sup>23</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-3, h. 69

seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya atau tidak bersaksi dengan transaksi kedua belah pihak

Jika koperasi dipahami secara istilah sebagaimana dijelaskan di atas, maka koperasi belum ada pada masa Nabi bahkan pada masa para imam mazhab fiqh. Koperasi adalah lembaga yang munculnya di kalangan umat Islam pada masa modern, sedangkan pada masa klasik belum ada, berbeda dengan gadai, jual beli, pinjam-meminjam, dan beberapa aktivitas ekonomi lain yang sudah ada pada masa Nabi dan seterusnya.

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkahta 'awuniyah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan diantara syarat sah *mudharabah* itu adalah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. Itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut diatas (*menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari mudharabah*), maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek* (Jakarta : Tazkia Cendikia, Maret 2001), Cet. Ke-1, *Op.Cit*, h. 122



Sedangkan Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab syirkahta'awuniyah tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha. Sebab syirkahta'awuniyah modal usahanya adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itudi kelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing- masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, diaberhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.<sup>25</sup>

#### **4. Ketentuan Mendirikan Koperasi**

##### **a. Rapat Persiapan**

Tidak semua usaha dapat dijalankan sendiri secara perorangan. Dalam kehidupan ekonomi atau bisnis, ada usaha-usaha tertentu yang membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Banyak badan usaha yang dapat didirikan untuk mengakomodasi sumberdaya manusia agar terwujud kerjasama. dari sekian banyak badan usaha (persekutuan), diantaranya ada yang tidak memiliki badan hukum dan ada yang telah memiliki badan hukum sehingga keberadaannya dapat diakui secara yuridis formal. Karenanya sebagai badan hukum, koperasi dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan.

Pendirian koperasi sebaiknya diawali oleh keinginan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama melalui

---

<sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h.290

pengembangan usaha yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggota. Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan rencana pembentukan koperasi meliputi antara lain penyusunan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan hal-hal lain yang diperlukan untuk pembentukan koperasi. Dalam rapat pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada para pendiri.

Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder sekurang-sekurangnya 3 (tiga) koperasi yang diwakili orang yang telah berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi yang bersangkutan. Rapat pembentukan dihadiri oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat nasional dihadiri oleh pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah.
- Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat provinsi dihadiri oleh pejabat dinas/istansi yang membidangi koperasi tingkat provinsi

Pembentukan koperasi sekunder dan primer tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh pejabat dinas/istansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota.<sup>26</sup>

Dalam rapat pembentukan koperasi biasanya dibahas mengenai pokok-pokok materi anggaran dasar koperasi, susunan nama pengurus dan

---

<sup>26</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta/pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

pengawas koperasi yang pertama. Pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi wajib dituangkan ke dalam bentuk : (1) berita acara rapat pendirian koperasi, yaitu risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditanda tangani oleh notaris pembuat akta koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis; dan (2) notulen rapat pendirian yaitu laporan mengenai jalanya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga mengikat dan merupakan dokumen resmi.

b. Menyusun AD/ ART

Akibat hukum dari suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat masing-masing pihak. Untuk mendirikan koperasi tentu diperlukan adanya kesepakatan perjanjian dari semua anggota. Hasil kesepakatan perjanjian tersebut kemudian harus dituangkan dalam bentuk penyusunan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat hak dan kewajiban untuk dijadikan sebagai dasar operasionalnya.

Pembentukan koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan koperasi dilakukan melalui pengesahan akta pendirian dengan mencantumkan anggaran dasar (AD) yang sekurang-kurangnya membuat tentang: *Daftar nama Pendiri, Nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, termasuk ketentuan mengenai sanksi.* Sedangkan yang dimaksud anggaran

dasar koperasi itu sendiri adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh para pendiri berdasarkan kesepakatan untuk mengatur hubungan hukum dalam suatu organisasi yang akan dijalankannya.

Dengan menyadari dinamika ekonomi, tidak tertutup bagi koperasi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan melakukan perubahan antara lain terhadap anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota. Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan dibidang usaha, penggabungan atau pembagian koperasi wajib dianjurkan secara tertulis untuk mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. apabila akta perubahan anggaran dasar koperasi yang terkait bidang usaha dibuat sendiri oleh pengurus koperasi dan notaries, maka pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

<b>Syarat Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar terkait Bidang Usaha</b>	
<b>Melalui Pengurus</b>	<b>Melalui Notaris</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dua rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup.</li> <li>- Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi.</li> <li>- Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi</li> <li>- Fotocopy bukti daftar anggota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah dirubah bermaterai cukup</li> <li>- Berita acara rapat atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencantumkan nomor pokok wajib pajak (NPWP)</li> <li>- Dokumen lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>keputusan rapat</li> <li>- Data akta perubahan anggaran dasar yang ditanda tangani Notaris</li> <li>- Fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh N otaris</li> <li>- Dokumen lainnya yang ditetapkam sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
---	--

Pengurus koperasi wajib mengumumkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam media massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan sekurang-kurangnya dua kali selama tenggang waktu paling lama empat puluh lima hari.

Pejabat berwenang, menyimpan laporan keputusan rapat anggota tentang perubahan anggaran dasar koperasi tersebut dalam bundle arsip surat keputusan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, apabila trjadi perbedaan antara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dengan yang ada dikoperasi, maka yang dianggap sah adalah yang ada di pejabat berwenang.<sup>27</sup>

#### c. Sumber Pemodalan

Untuk mendirikan usaha berbadan hukum koperasi, diperlukan adanya ketersediaan modal.Modal utama mendirikan koperasi adalah

---

<sup>27</sup> *Ibid*

diwujudkan dalam bentuk simpan anggota. Penggunaan simpan uang untuk modal usaha bagi pemiliknya adalah lebih baik dari pada hanya terkumpul tanpa memberikan manfaat. Penggunaan simpan uang (dana) secara yuridis hukumnya diperbolehkan selama segala kemungkinan terjadinya resiko ditanggung sendiri oleh pengguna.

Penggunaan midal yang terkumpul dari simpan uang para anggota koperasi pada dasarnya adalah pemiliknya sendiri. Untuk mendapatkan manfaat dari wadah koperasi, para anggotavmemperkirakan kepada pengurus yang diangkat melalui rapat anggota.

Simpanan pokok/wajib dari anggota pendiri merupakan modal utama ketika akan membentuk koperasi. Kelebihan dari simpanan itu dapat dijadikan sebagai dana cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat membutuhkan. Bahkan disamping simpanan anggota, masih dapat dipercaya cara lain yang dapat digunakan oleh koperasi untuk menghimpun dana.

Pembiayaan koperasi yang berasal dari penyandang dana dapat dibenarkan secara hukum selama dilakukan dengan cara-cara sah. Modal koperasi yang terhimpun dari para investor tersebut, sebaiknya dikembangkan melalui pemberdayaan ekonomi di sector riil agar dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan pengusaha kecil.

Adapun sumber modal yang selama ini menjadi tumpuan dalam setiap mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

- Modal koperasi dari anggota sendiri merupakan modal yang mengandung resiko. Termasuk kategori modal sendiri dalam mendirikan koperasi
  - a) Simpanan Pokok adalah sejumlah uang tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk menyerahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota
  - b) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam kesempatan tertentu meskipun jumlahnya tidak mesti sama.
  - c) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha untuk memupuk modal sendiri serta menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Posisi dana cadangan dalam sisi pasiva menunjukkan bahwa jika terjadi kerugian dengan sendirinya akan terkompensasi dengan dana cadangan, dan apabila tidak mencukupi ditambah dengan simpanan anggota.
  - d) Hibah sebagai bentuk pemberian tanpa disertai imbalan tertentu.  
Hibah merupakan pemberian yang diterima koperasi dari pihak lain baik wujudnya berupa uang maupun barang.
- Modal koperasi diperoleh dari pembiayaan yang diantaranya diwujudkan melalui bentuk pinjaman. Untuk pengembangan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya.



Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu mengembangkan diri melalui perluasan kegiatan usahanya guna meningkatkan peranannya secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Sehubungan dengan hal tersebut, koperasi perlu memperkuat struktur permodalannya melalui pemupukan dengan modal dengan menyertakan pihak lain dalam permodalan koperasi dalam bentuk modal penyertaan.

d. Perjanjian Pinjam-meminjam

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang di dasari kata sepakat, antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengaitkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak serta menimbulkan akibat hukum.”<sup>28</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah : suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>29</sup>

Dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 Pasal 91 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman diluar anggota atau dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Kemudian dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 122 butir 2 juga disebutkan bahwa unit koperasi simpan

---

<sup>28</sup>Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, h. 42

<sup>29</sup>*Ibid*

pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota.<sup>30</sup>

## 5. Jenis Koperasi

### a. Koperasi menurut tingkatan

Dilihat dari tingkatannya, koperasi dibagi menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Sebagai syarat mendirikan koperasi primer diperlukan anggota paling sedikit 20 orang.

Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Untuk mendirikan koperasi sekunder minimal merupakan gabungan tiga koperasi primer yang sejenis.

Koperasi sekunder dapat berbentuk pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi.<sup>31</sup>

### b. Koperasi Menurut Sifat Usaha

Koperasi dilihat dari usahannya, koperasi dibedakan atas koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam (kredit), dan koperasi produksi.<sup>32</sup>

#### 1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang usahanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para anggotanya, seperti beras, gula, susu, kopi, teh, daging, ikan, minyak sayur, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak tanah, sabun, deterjen, pakaian, dan sandal.

---

<sup>30</sup> Undang-undang Perkoperasian RI No. 17 Tahun 2012

<sup>31</sup> Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, UIN Maliki Press, Cet-2, Malang, 2013, h. 21

<sup>32</sup> Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, h. 61

Koperasi konsumsi biasanya membeli bermacam ragam barang-barang kebutuhan sehari-hari tersebut dari agen atau produsen dalam jumlah banyak, dan menjualnya pada anggota dengan harga terjangkau.

Dalam aktifitasnya, koperasi konsumen Indonesia menggunakan beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut di antaranya adalah: setiap penjualan harus dilakukan dengan tunai. Pembeli tidak boleh membeli secara kredit atau mengangsur. Mutu barang yang dijual harus terjamin. Maksudnya, paling tidak barang yang dijual dalam koperasi konsumsi sama mutunya dengan barang yang berkualitas di pasar.

Prinsip penting lainnya adalah masalah kejujuran, yaitu ukuran dan timbangan barang yang dijual harus dapat dipercaya. Tidak boleh dipaksakan. Anggota yang lebih banyak membeli dari koperasi, mendapatkan bagian laba yang lebih besar pula. Selain menjual kepada anggota, koperasi juga boleh menjual kepada masyarakat lain yang bukan anggota.

## 2) Koperasi Simpan Pinjam (Kredit)

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dengan urusan penyimpanan dan peminjaman uang. Simpanan diterima dari anggota dalam bentuk simpanan berikut.

- a) Simpanan pokok wajib, yaitu : simpanan yang disetor sekali pada saat mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan ini dapat ditarik kembali, kecuali kalau keluar dari keanggotaan

koperasi maka orang tersebut disebut diputihkan atau di  
berhentikan sebagai anggota.

- b) Simpanan wajib, yaitu : simpanan yang disetor secara teratur dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Simpanan wajib hanya boleh diambil setelah jangka waktu tertentu.
- c) Simpanan sukarela, yaitu : simpanan yang tidak ditetapkan jumlah dan waktu pembayarannya. Simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Uang yang dikumpulkan dari simpanan diatas, bias dipinjamkan kepada anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan biaya bunga yang ringan.

### 3) Koperasi Produksi

Koperasi Produksi adalah koperasi yang usahanya ditujukan untuk menghasilkan sejenis barang secara bersama-sama. Anggota koperasi produksi adalah produksi-produksi kecil yang menghasilkan barang-barang sejenis. Yang termasuk dalam koperasi produksi ini antara lain sebagai berikut.

- a) Koperasi Pertanian, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian. Usaha-usaha pertanian antara lain menyediakan sarana produksi (bibit, pupuk, obat hama, obat tanaman dan obat penyubur tanaman yang lainnya) dan alat-alat pertanian (cangkul, sabit, bajak, traktor tangan dan alat-alat lainnya yang menunjang terhadap pertanian).

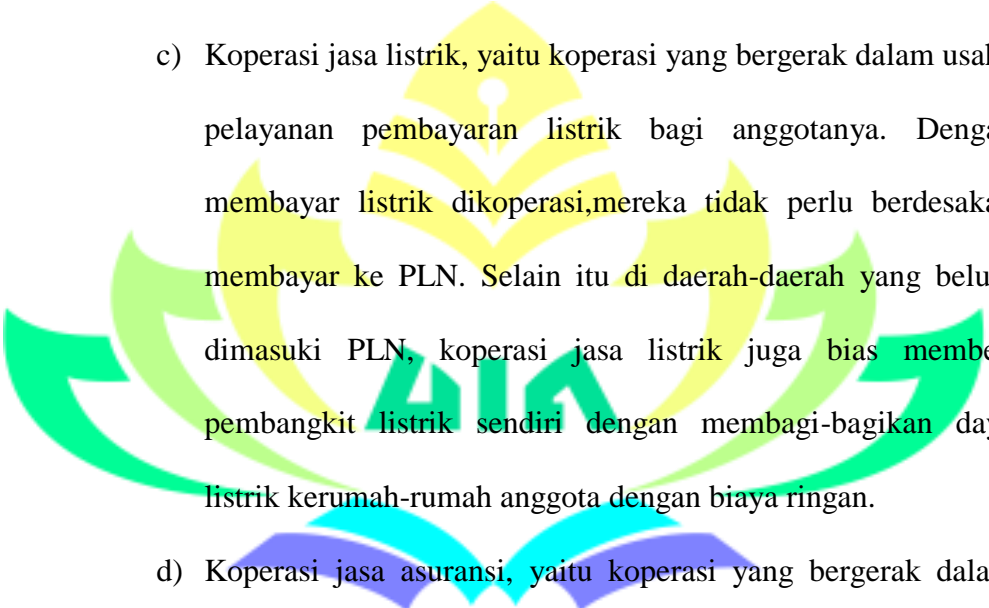
- b) Koperasi Peternakan, yaitu koperasi produksi yang bergerak dalam usaha peternakan, seperti peternakan sapi, kerbau, kambing, ayam, dan itik.
- c) Koperasi Perkebunan, yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha perkebunan, seperti perkebunan karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh, dan coklat.
- d) Koperasi Perikanan, yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha perikanan.
- e) Koperasi Industri dan Kerajinan, yaitu koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha industri dan kerajinan, seperti industri mebel, tekstil, batik, ukiran, anyaman, dan lain sebagainya.

#### 4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang kegiatan utamanya melaksanakan pemasaran dari barang-barang yang dihasilkan oleh anggota. Semua koperasi produksi diatas bias disebut koperasi pemasaran bila koperasi produksi tersebut juga ikut memasarkan barang-barang yang dihasilkan oleh para anggota.

#### 5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah suatu bentuk usaha perkoperasi yang fungsi dan kegiatannya memberikan pelayanan jasa kepada anggota-anggotanya. Sedangkan contoh-contoh koperasi jasa di antaranya adalah sebagai berikut :

- 
- a) Koperasi jasa angkutan, yaitu koperasi yang bergerak dalam jasa angkutan, baik angkutan barang maupun penumpangan. Misalnya koperasi taksi dan koperasi angkutan Jakarta (kopaja).
  - b) Koperasi jasa perumahan, yaitu koperasi yang bergerak dalam usaha penjualan atau penyewaan rumah bagi para anggota dengan cara dan biaya yang lebih mudah dan terjangkau.
  - c) Koperasi jasa listrik, yaitu koperasi yang bergerak dalam usaha pelayanan pembayaran listrik bagi anggotanya. Dengan membayar listrik dikoperasi, mereka tidak perlu berdesakan membayar ke PLN. Selain itu di daerah-daerah yang belum dimasuki PLN, koperasi jasa listrik juga bias membeli pembangkit listrik sendiri dengan membagi-bagikan daya listrik kerumah-rumah anggota dengan biaya ringan.
  - d) Koperasi jasa asuransi, yaitu koperasi yang bergerak dalam asuransi, mencakup antara lain asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, dan asuransi beasiswa.
- 6) Koperasi serba usaha

Sesuai namanya koperasi serba usaha adalah koperasi yang bergerak dalam bidang atau lapangan usaha, seperti usaha konsumsi, simpan pinjam, produksi, pemasaran, maupun jasa. Salah satu koperasi bentuk serba usaha adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Mahasiswa. Kalau KUD khusus didirikan memenuhi berbagai kebutuhan rakyat desa yang pada umumnya bekerja sebagai petani

atau industri di pedesaan. Sedangkan Koperasi Mahasiswa adalah khusus didirikan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dan sebagai pembelajaran untuk berwira usaha kepada mahasiswa yang ingin menjadi anggota dan menjadi pengurus.

Dalam undang-undang no 25 tahun 1992 disebutkan bahwa “koperasi adalah usaha yang memperanggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Perkoperasian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan koperasi.

Koperasi yang ada di Indonesia, adalah koperasi yang berbentuk konvensional pada umumnya yang memprioritaskan kesejahteraan anggota yang dimana dalam pelaksanaannya masih menggunakan pinjaman yang meminta imbalan yang tidak sesuai, maka dalam Islam dibutuhkan pengoprasian usaha yang berbentuk sesuai dengan syariat Islam.

Pada koperasi sejahtera, untuk memperoleh hasil yang baik, calon peminjam harus menjalani berbagai prosedur atas sistem yang koperasi telah tetapkan. Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain

1. Warga Negara Indonesia
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Memiliki Usaha



4. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp.200.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. Rp. 30.000,- dibayar setiap bulan
5. Menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan yang ada didalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera
6. Materai 6000
7. Berdomisili Kota Bandar Lampung

Setelah melengkapi syarat tersebut, maka calon anggota koperasi mengikuti langkah selanjutnya, yakni :

1. Melengkapi pengajuan dana pinjaman dengan cara mengajukan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha
2. Pengurus koperasi nantinya akan mempertimbangkan proposal pengajuan pinjaman sesuai prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya

Jika pengajuan pinjaman yang diajukan disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pinjaman koperasi simpan pinjam sejahtera

Secara Historis pada jaman penjajahan belanda model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakasai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan Sarikat Dagang Islam (SDI) oleh H. Saman Hudi di Solo Jawa Tengah yang menghimpun para anggotanya dari para pedagang batik yang beragama Islam setelah itu kelahiran koperasi syari'ah di Indonesia dilandasi oleh keputeusan menteri (KepMen) koperasi

dan UKM Republik Indonesia nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, tanggal 10 september 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha.

## **B. Koperasi Dalam Pandangan Islam**

### **1. Pengertian Syirkah**

Dari segi etimologi kata koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu coperation yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi terminologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Di samping koperasi konvensional, akhir-akhir ini banyak bermunculan koperasi syariah. Koperasi syariah secara teknis adalah koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada sumber syariah Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist

Landasan Koperasi dalam Al-Qur'an

﴿وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُكُوعًا فَاسْتَغْفَرَ تَتَنَّهُ أَنَّمَا دُودُ وَظَنَّهُ﴾

﴿مَّا وَقَلِيلٌ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلُطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِنْ

*Artinya : "Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh." (QS. Shad:24)".<sup>33</sup>*

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 363

mata karena Allah atau sportifitas dalam kerja sama, maka hal negatif tidak akan terjadi.

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep tolong-menolong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Untuk memperoleh hasil yang baik, calon peminjam harus menjalani berbagai prosedur atas sistem yang koperasi telah tetapkan.

Adapun syarat dan rukun syirkah adalah sebagai berikut :

1. Adanya Sighat (lafadz akad)
2. Adanya orang yang berserikat (berakal, baligh, merdeka)
3. Ada pokok pekerjaan
4. Pencampuran harta (pokok modal)
5. Keuntungan atau kerugian

Secara etimologis syarikah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Selanjutnya, kata syirkah itu digunakan oleh ummat Islam untuk sebuah transaksi perkongsian dalam dunia bisnis.

Kata Syirkah dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (fiil madhi), *yasraku* (fiil mudhari'), *syarikan/syarikatan* (mashdar/kata dasar), artinya

menjadi sekutu atau serikat.<sup>34</sup> Secara bahasa *syirkah* berarti *Ikhtilat* yang artinya percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.<sup>35</sup>

Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Sedangkan menurut istilah, para Fuqaha berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut Mahmud Syaltut. Sebagaimana dikutip oleh Masjuk Zuhdi, koperasi (*syirkah ta'awwuniyah*) merupakan suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh para ahli fiqh terdahulu yang membagi *syirkah* menjadi empat jenis:

*Pertama: syirkah abdan*, yaitu suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>36</sup>

*Kedua, syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah*.

---

<sup>34</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), h. 12.

<sup>35</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 87

<sup>36</sup>Revisond Baswir, *Koperasi*, h. 75-85

*Ketiga.Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai.

*Keempatsyirkah 'inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.<sup>37</sup>

Sebagaimana pemaparan diatas dapat disimpulkan Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan. prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam *ta'awun* dan *ukhuwah* dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memilki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

Berdasarkan macam-macam syirkah di atas yang lebih sesuai dengan koperasi adalah syirkah inan karena dalam syirkah inan ini menggunakan modal dan kerjasama sebagai persyaratannya juga pembagian keuntungan yang sama dalam sistem perekonomian.

Sesuai dengan pengertian koperasi yang adanya kesepakatankerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk

---

<sup>37</sup>Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, *Op.Cit.*h. 149

melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing

Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. ...”<sup>38</sup>

Koperasi simpan pinjam sejahtera merupakan koperasi yang menganut sistem konvensional. Berdasarkan dalil diatas, hukum peminjaman bagi orang yang bukan anggota koperasi dapat diberlakukan oleh koperasi, hal ini didasarkan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna / menjadi partner bersama-sama dengan muslim lainnya.

## 2. Dasar Hukum Syirkah Inan

Ajaran Islam pada prinsipnya sangat memperhatikan akan kebutuhan umatnya, karena ajaran islam cocok dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Telah menjadi fitrah bahwa manusia itu saling ketergantungan dan saling membutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, seperti dalam persekutuan atau syirkah. Persekutuan atau syirkah tidak akan berjalan tanpa adanya orang lain. Yang menjadi patnernya. Adapun

---

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 85

dasar hukum disatariatkanya syirkah adalah :

a. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman :

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : "... Maka mereka bersekutu dalam yang sepertinya itu (QS.An-Nisa':12)<sup>39</sup>

وَأَنَابَ رَاكِعًا وَخَرَّ رُفَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فِتْنَةً أَنَّمَا أُوْدُوْظَنُ هـ

هَمْ مَّا وَقَلِيلُ الصَّالِحِينَ وَاعْمَلُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلُطَاءُ مِنْ كَثِيرٍ وَإِنْ

Artinya : "...dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzholim, kepada sebagai yang lain, kecuali orang-orang beriman dan beramal shalih dan amat sedikitlah mereka ini". (QS. Shad : 24)<sup>40</sup>

### 3. Macam-macam Syirkah

Perserikatan dalam hukum islam yang lazim disebut dengan syirkah, terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Syirkah Amlak

Syirkah amlak ialah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Adakalanya bersifat ikhtiari atau jabari. Yang dimaksud dengan ikhtiari adalah : bahwa dua orang yang dihibahkan atau diwariskan sesuatu lalu mereka menerima maka barang yang dihibahkan atau diwariskan menjadi milik mereka berdua.

Demikianlah hanya pula jika mereka membelu sesuatu yang mereka bayar berdua maka barang yang mereka beli itu disebut dengan syirkah milik. Sedangkan yang dimaksud dengan jabari adalah; sesuatu yang berstatus sebagai milik dari lebih satu orang

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 63

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 363



karena mau tak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan.

b. Syirkah Uqud

Syirkah uqud adalah bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu keperntingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.<sup>41</sup> Adapun syirkah uqud ini terbagu menjadi empat macam yaitu

1) Syirkah Inan

Syirkah inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam kerja dan modal untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung atau rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing baik dijalankan secara bersama-sama atau dengan menunjuk salah satu peserta syirkah untuk menjalankannya.

Dengan demikian komponen penyusun syirkah inan ini adalah eksistensi dua pihak atau lebih untuk yang bertransaksi, objek transaksi yang meliputi modal dan jenis usaha dan perjanjian pembagian keuntungan juga kerugian usaha dan ketentuan upah orang yang menjalankannya.

Hal ini sesuai dengan pengertian koperasi yang menggunakan modal usaha untuk mencari keuntungan dalam bentuk kerjasama di lapangan perekonomian.

2) Syirkah Mufawadhah

---

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, 1997, h.175-176

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Modalnya harus sama banyak
- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum
- c) Satu agama, sesama muslim
- d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas syirkah (kerja sama)

3) Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.<sup>42</sup> Mereka dapat melakukan pembelian barang untuk dijual lagi dengan tidak kontan hanya semata-mata mengandalkan kepercayaan.

4) Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah apabila dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu usaha dengan tenaga masing-masing. Misalnya : persekutuan membuka usaha diantara para tukang kayu, tukang batu, tukang besi, tukang jahit dan kerjanina tangan lainnya yang menggunakan tenaga dan keterampilan khusus.<sup>43</sup>

Berdasarkan macam-macam syirkah di atas yang lebih

---

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, h. 69-70

<sup>43</sup> Hamzah Ya'cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, h. 262

sesuai dengan koperasi adalah syirkah inan karena dalam syirkah inan ini menggunakan modal dan kerjasama sebagai persyaratannya juga pembagian keuntungan yang sama dalam sistem perekonomian dengan tujuan dan kesepakatan bersama.

#### **4. Syarat dan Rukun Syirkah**

Dalam suatu perserikatan atau persekutuan, untuk lebih baiknya jika terlebih dahulu mengetahui tentang syarat dan rukunnya, yang dibenarkan dalam Islam sebagai sistem Mua'malah. Adapun syarat dan rukun syirkah adalah sebagai berikut :

a. Ada shighat (lafadz akad)

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata “kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankan dengan jual beli dan lainnya”. Jawaban yang lain, “ saya terima seperti yang engkau katakan itu”.

b. Ada orang yang berserikat, syaratnya :

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Merdeka dan dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa)

Dengan demikian bagi orang yang berakal sehat dan baligh (dewasa), hendaknya dapat merencanakan dan memperhitungkan alternative langkah berikut dengan harta syirkah tersebut. Sehingga diharapkan dapat mendapatkan kemaslahatan diri dari pada pihak dan kemaslahatan harta mereka. Sedangkan bagi seorang hamba tidak sah

mengadakan perserikatan dengan seseorang yang merdeka kecuali dengan izin tuanya.

c. Ada pokok pekerjaan

Adapun pokok pekerjaan yang diisyaratkan dalam syirkah itu tidak termasuk pada pekerjaan yang dilarang oleh syari'ah seperti berserikat untuk merampok, mencuri dan menipu.<sup>44</sup>

d. Percampuran harta (pokok modal)

Mengenai harta pokok dalam syirkah diisyaratkan :

- 1) Harta atau pokok modal yang berupa uang. Barang atau lainnya yang dijadikan obyek adad adalah harta yang menjadi miliknya sendiri atau menjadi milik para pihak yang mengadakan syirkah.
- 2) Harta atau barang yang dipakai syirkah harus sama jenis dan warnanya.<sup>45</sup> Barang yang tidak sejenis tidak sah dipakai dalam syirkah, seperti emas dan perak, barang halus dengan barang kasar, atau gandum putih dengan gandum merah.

e. Keuntungan atau kerugian

Keuntungan atau kerugian dibagi menurut ukuran harta masing-masing. Apabila keduanya mensyaratkan keuntungan yang sama dengan modal yang berbeda atau sebaliknya, hal itu tidak sah.<sup>46</sup>

## 5. Pandangan Ulama Tentang Syirkah inan

Didalam memahami suatu pengertian, seseorang dengan orang lain terkadang terjadi perbedaan pandangan atau pendapat dalam

---

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar baru Argen Sindo, 1997, h. 297

<sup>45</sup> Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, Trigenda Karya, Bandung. 1995, h. 189-190

<sup>46</sup> *ibid*

pengertian atau masalah tersebut, begitu pula dengan ulama berbeda pandangan atau pendapat tentang syirkah, yaitu sebagai berikut :

a. Syirkah inan

Mengenai syirkah inan ini, para ulama telah bersepakat tentang sahnya, hanya ada sedikit perbedaan paham tentang syarat-syarat dan cara-cara.<sup>47</sup> Dalam syirkah inan ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan. Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain, dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedangkan yang lainnya tidak. Dan boleh pula dalam syirkah ini keuntungan sama sebagaimana pula boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal. Demikian pengulangannya.<sup>48</sup>

Fuqaha telah sepakat bahwa apabila keuntungan mengikuti kepada modal yakni apabila modal serikat itu keduanya sama besarnya maka keduanya membagi keuntungan separuh-paruh. Kemudian mereka berselisih pendapat apakah modal keduanya boleh berbeda sementara keuntungannya dibagi sama? Imam Malik dan Syafi'I berpendapat bahwa cara seperti itu tidak boleh. Tetapi Fuqahah Iraq membolehkannya.<sup>49</sup>

## 6. Pinjaman dalam Islam (*Ariyah*)

Pinjaman (*,,ariyah*) berasal dari kata *at-ta''wur* yaitu

---

<sup>47</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, h. 298

<sup>48</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.* h. 176

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, Jilid 4, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hml., 304

ganti- mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun „*ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.<sup>50</sup>

Para ulama berpendapat bahwa „*ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan pemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari pemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>51</sup>

### **C. Perbandingan Syirkah Dengan Koperasi**

Koperasi merupakan sebuah bangun perusahaan modern yang diterapkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ia memiliki definisi yang khusus yaitu Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan definisi ini, koperasi memiliki makna yang amat spesifik.

---

<sup>50</sup>Syarh al-Minhaj, Juz V, h. 115.

<sup>51</sup>Murtadha Muttahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995, h. 68

Sementara itu, syirkah dalam islam didefinisikan sebagai suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan definisi ini, syirkah memiliki makna yang lebih umum dibandingkan dengan koperasi. Bisa dikatakan, koperasi merupakan bagian dari syirkah karena pada dasarnya syirkah merupakan konsep kerjasama dalam islam, dimana koperasi merupakan salah satu instrumen bekerjasama tersebut.

Bila ditinjau lebih jauh, koperasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan syirkah inan dimana didalam sebuah transaksi kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modalnya kemudian berusaha bersama-sama mengembangkan modal tersebut. Asas yang digunakan pada keduanya juga sama-sama bersumber pada saling percaya dan kekeluargaan.

Namun begitu, apabila para ulama bersepakat dengan kebolehan transaksi syirkah inan, maka ada beberapa hal yang menghalangi kebolehan itu dalam koperasi. Diantaranya ialah karena koperasi tidak secara jelas mengatur tentang pembagian beban apabila menderita kerugian sedangkan dalam syirkah inan kerugian dibagi berdasarkan besar penyertaan modal. Selain itu, koperasi Indonesia juga tidak memiliki aturan mengenai bunga yang mana dalam islam dilarang secara keras karena unsur riba yang terkandung di dalamnya.

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **C. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera berada di Jl. Purnawirawan Gg. Madu berdekatan dengan pasar tradisional masyarakat setempat adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan kemilling permai.

##### **2. Sejarah Berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera**

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera didirikan oleh para pengusaha kecil menengah pada tahun 2012 yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya masyarakat setempat mengelola usaha dengan tradisional.

Tujuan didirikannya KSPS ini adalah untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan kemiling permai. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

##### **3. Visi Dan Misi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera**

Visi: terwujudnya koperasi simpan pinjam yg mandiri dengan berlandaskan amanah untuk membangun ekonomi bersama

Misi:



- a. Mengajak seluruh potensi yang ada dalam masyarakat dengan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama, agar mereka dapat bersama-sama, bersatu padu dan beritikad baik dalam membangun ekonomi kerakyatan secara bergotong royong dalam bentuk koperasi.
- b. Membantu para pedagang kecil dan menengah didalam mobilisasi permodalan demi kelancaran usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

#### 4. Struktur Organisasi

Secara umum pengurus koperasi terdiri dari pengawas, ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekertaris. Tugas dan wewenang masing-masing komponen pengurus itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Pengawas

Badan pengawas berfungsi sebagai pengawas seluruh aktivitas yang ada di koperasi meliputi organisasi dan usaha serta pelaksanaan kebijakan pengurus. Adapun tugas-tugasnya adalah:

1. Mengawasi semua kebijakan operasional pengurus
2. Memeriksa dan menilai pelaksanaan kegiatan organisasi usaha.
3. Memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan-catatan atau buku-buku organisasi.

- b. Ketua

Ketua koperasi memiliki tanggung jawab baik kedalam maupun keluar organisasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus

2. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan
3. Melaksanakn segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota dan rapat pengurus

Adapun wewenang dari ketua

1. Menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Menandatangani surat-surat dan perjanjian bersama sekretaris dan bendahara.
3. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

c. Bendahara

Pada dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus keuangan koperasi, antara lain :

1. Bertanggung jawab masalah keuangan koperasi
2. Mengatur jalannya pembukuan keuangan
3. Menyusun anggaran setiap bulan
4. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang
5. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi
6. Menyusun laporan keuangan
7. Mengendalikan anggaran

d. Sekretaris

Tugas utama sekretasi adalah sebagai pertanggung jawaban administrasi koperasi, adapun tugasnya sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab kegiatan administrasi
2. Mengusahakan kelengkapan organisasi
3. Mengatur jalannya adminsitasi

4. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan
  5. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas
  6. Menyusun rancangan rencana program kerja organisasi
- e. Anggota

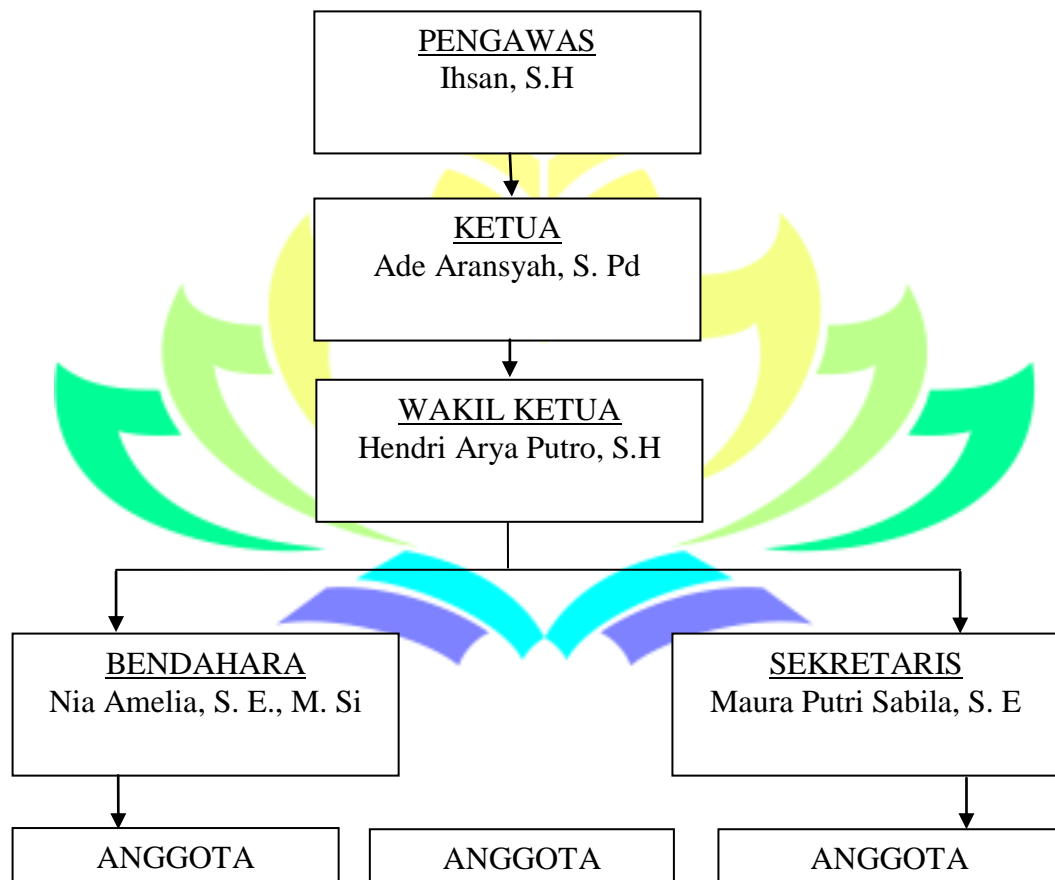
Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok

Tabel 1  
Daftar Nama Anggota KSP Sejahtera

No	Nama Anggota
1	Ade Aransyah
2	Panji Waluyo
3	Maura Putri Sabila
4	Salma Riasari
5	Jopan Saputra
6	Jalim Kodiyat
7	Muhammad Sub'ai
8	Arzum Rahyuda
9	Sofian
10	M. Nafit Aditya
11	Rivaldi Putra
12	Rahmawati
13	Agung Saputra
14	M. Nur Hanif
15	Ramdan Yusuf
16	Tanti Fikasari
17	Lutfi Apriawan
18	Zuli Apriyan
19	Fadia Nur Wahyudi
20	Nadila Irza
21	Nia Amelia
22	Ratih Nurherliani
23	Rena Lestari
24	Ria Andriyana
25	Rifqi Ihsan
26	Rio Putratama

27	Rara Andini
28	Ihsan
29	Mutiara
30	Baddiah
31	Rama Jaya
32	Siti Awanah
33	Indra Pratama
34	Hendri Arya Putro
35	Raihan

- Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.



Gambar 1  
Struktur Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera

#### 4. Produk Koperasi

Modal usaha atau produk koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela.

Modal yang disimpan oleh anggota tidak dapat diambil kecuali keluar dari keanggotaan atau meninggal dunia. Keanggotaan Koperasi juga

tidak dapat diwariskan simpanan pokok tersebut kepada orang lain.

Adapun aturan yang harus di ikuti oleh anggota koperasi simpan pinjam sejahtera yaitu :

**a) Simpanan Pokok (KSP)**

Simpanan pokok merupakan dana yang memiliki besaran nilai yang sama yang dibayarkan pada saat pertama kali mendaftar menjadi anggota. Simpanan ini tidak bisa diambil selama menjadi anggota.

Aturan pada koperasi simpanan pokok tidak begitu rumit. Ketika masyarakat telah menjadi anggota, cukup memberikan dana awal yang sudah ditetapkan dan berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, koperasi sejahtera menetapkan simpanan pokok bagi dan untuk setiap anggota sebesar Rp 200.000,- Kemudian, dalam masa menjadi anggota, dana tersebut tidak bisa diambil, tetapi ketika masa anggota selesai, dana akan disalurkan pada anggota secara bertahap sesuai dengan pengembalian dana.

**b) Simpanan Wajib (KSP)**

Simpanan wajib merupakan dana yang perlu disetorkan kepada koperasi pada batas waktu yang telah ditentukan. Jumlah dana untuk simpanan wajib ini tidak ditentukan besarannya. Dengan begitu, anggota bisa menyimpan sesuai dengan keinginan dan kesanggupan. Jenis simpanan ini bisa diambil kapan saja selama menjadi anggota. Simpanan wajib tidak ada aturan yang begitu ketat, hanya saja anggota perlu menyalurkan dana sebelum melewati batas ketentuan, jumlahnya pun sesuai kemampuan. Berdasarkan kesepakatan rapat

anggota pada koperasi sejahtera, simpanan wajib yang dapat disimpan mulai dari Rp 500.000-Rp 1.750.000, sesuai kemampuan masing-masing anggota.

**c) Simpanan Sukarela**

Simpanan sukarela merupakan simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil oleh anggota sewaktu-waktu.

Tabel 2  
Daftar Simpanan Anggota Koperasi Per 30 Juni-31 Desember 2017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	SIMPANAN POKOK	SIMPANAN WAJIB	SIMPANAN SUKARELA	TOTAL SIMPANAN
1	Ade Aransyah	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 2.500.000	Rp 3.200.000
2	Panji Waluyo	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
3	Maura Putri Sabila	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
4	Salma Riasari	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
5	Jopan Saputra	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
6	Jalim Kodiyat	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
7	Muhammad Sub'ai	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
8	Arzum Rahyuda	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
9	Sofian	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
10	M. Nafit Aditya	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000
11	Rivaldi Putra	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
12	Rahmawati	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	Rp 3.700.000
13	Agung Saputra	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
14	M. Nur Hanif	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000

15	Ramdan Yusuf	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
16	Tanti Fikasari	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
17	Lutfi Apriawan	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
18	Zuli Apriyan	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000
19	Fadia Nur Wahyudi	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
20	Nadila Irza	Perempuan	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
21	Nia Amelia	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
22	Ratih Nurherliani	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
23	Rena Lestari	Perempuan	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
24	Ria Andriyana	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
25	Rifqi Ihsan	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000
26	Rio Putratama	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000
27	Rara Andini	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
28	Ihsan	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
29	Mutiara	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.500.000		Rp 1.700.000
30	Baddiah	Perempuan	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
31	Rama Jaya	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	Rp 2.200.000
32	Siti Awanah	Perempuan	Rp 200.000	Rp 750.000		Rp 950.000
33	Indra Pratama	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
34	Hendri Arya Putro	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 500.000		Rp 700.000
35	Raihan	Laki-laki	Rp 200.000	Rp 1.750.000		Rp 1.950.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 7.000.000</b>	<b>Rp 42.250.000</b>	<b>Rp 6.000.000</b>	<b>Rp 55.250.000</b>

*Data Diperoleh Pada Tahun 2018<sup>52</sup>*

<sup>52</sup> Wawancara Kepada Ibu Maura Putri Sabila, S. E, Sekretaris Koperasi Sejahtera, pada 17 Mei 2018, pukul 10:00 WIB

Dari tabel data simpanan diatas, dapat diketahui bahwa modal awal Koperasi Sejahtera pada periode 30 Juni-31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp 55.250.000,-** Modal tersebut di dapat dari simpanan wajib pokok Sebesar **Rp 200.000,-** dengan total simpanan yang di peroleh dari semua anggota berdasarkan simpanan wajib semua anggota sebesar **Rp 42.250.000,-** sebagai jaminan peminjaman dana pada periode 30 Juni-31 Desember 2017.

### **5. Syarat Keanggotaan Koperasi**

Adapun persyaratan untuk menjadi anggota koperasi simpan pinjam antara lain

8. Warga Negara Indonesia
9. Fotocopy KK dan KTP
10. Memiliki Usaha
11. Menyetujui anggaran dasar dan peraturan yang ada dalam Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera
12. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp200.000,- dan iuran wajib diluar simpanan wajib untuk koperasi sebesar Rp. 30.000,- dibayar setiap bulan sebagai tambahan modal koperasi dan dapat dikembalikan apabila anggota tersebut keluar dari koperasi.
13. Materai 6000
14. Berdomisili Kota Bandar Lampung

Setelah melengkapi syarat tersebut, maka calon anggota koperasi mengikuti langkah selanjutnya, yakni :



15. Melengkapi pengajuan dana pinjaman dengan cara mengajukan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha
16. Pengurus koperasi nantinya akan mempertimbangkan proposal pengajuan pinjaman sesuai prosedur yang sudah ditentukan sebelumnya
17. Jika pengajuan pinjaman yang diajukan disetujui, maka pencairan pinjaman dan lama pengembalian akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad pinjaman koperasi simpan pinjam sejahtera.

Orang yang meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, meskipun jumlahnya hanya sebagian dari uang simpanannya sendiri, dia tetap dianggap sebagai peminjam yang diharuskan membayar uang administrasi. Hal ini merujuk pada kebijakan bank, seseorang diperbolehkan mengambil seluruh uang simpanannya, kecuali sejumlah tabungan minimum yang harus disisakan sebagai bukti bahwa dia masih tercatat sebagai nasabah, dan dia tidak dianggap sebagai peminjam dan juga tidak dikenakan bunga.

Uang yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, tidak dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan; sedangkan uang yang disimpan di Bank dapat diambil sewaktu-waktu diperlukan oleh si penyimpan. Bunga yang diberikan oleh Bank kepada orang yang menyimpan uangnya di Bank tersebut hanya diperhitungkan dengan jumlah uang yang disimpan; sedang di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera pembagian sisa hasil usaha tidak hanya diperhitungkan dengan uang simpanannya, melainkan dengan keseringan meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera.

## **6. Tujuan dan Target Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera**

- a. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.
- b. Target Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut "Sisa Hasil Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi adalah sama atau dibagi rata, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

### **D. Praktik Peminjaman Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera**

Orang yang meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, meskipun jumlahnya hanya sebagian dari uang simpanannya sendiri, dia tetap dianggap sebagai peminjam yang diharuskan membayar uang administrasi. Hal ini merujuk pada kebijakan bank, seseorang diperbolehkan mengambil seluruh uang simpanannya, kecuali sejumlah tabungan minimum yang harus disisakan sebagai bukti bahwa dia masih tercatat sebagai nasabah, dan dia tidak dianggap sebagai peminjam dan juga tidak dikenakan bunga.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut "Sisa Hasil

Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera. Artinya, anggota yang paling sering meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera tersebut akan mendapat bagian paling banyak dari SHU dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Setiap anggota koperasi dapat meminjam uang untuk kepentingan para anggota koperasi. Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di awal peminjaman. Pinjaman yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang dipinjamkan kepada anggota digunakan untuk modal usaha atau sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

Contoh, Dalam pra survey yang dilakukan oleh penulis pada objek penelitian yaitu pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, penulis menemukan bahwa koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman dana kepada orang yang bukan anggota koperasi hanya dengan modal kepercayaan dari anggota koperasi. Misal, non anggota akan meminjam dana sebesar Rp 2.000.000,- dengan mengatasnamakan proposal yang dibuat oleh anggota aktif, karena hanya anggota aktif yang dapat membuat proposal dan koperasi hanya mengeluarkan dana untuk anggota aktif.

Bapak Erwin Suhendra yang bukan anggota koperasi aktif pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera memerlukan dana sebesar Rp 2.000.000,- untuk kebutuhan mendesak, Bapak Erwin meminjam dana kepada koperasi simpan pinjam sejahtera dengan mengatasnamakan

proposal yang dibuat oleh Bapak Ramdan Yusuf yang merupakan anggota aktif pada koperasi tersebut. Peminjaman dapat dicarikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera berdasarkan jaminan kepercayaan yang dilimpahkan kepada anggota aktif koperasi, yaitu Bapak Ramdan Yusuf.

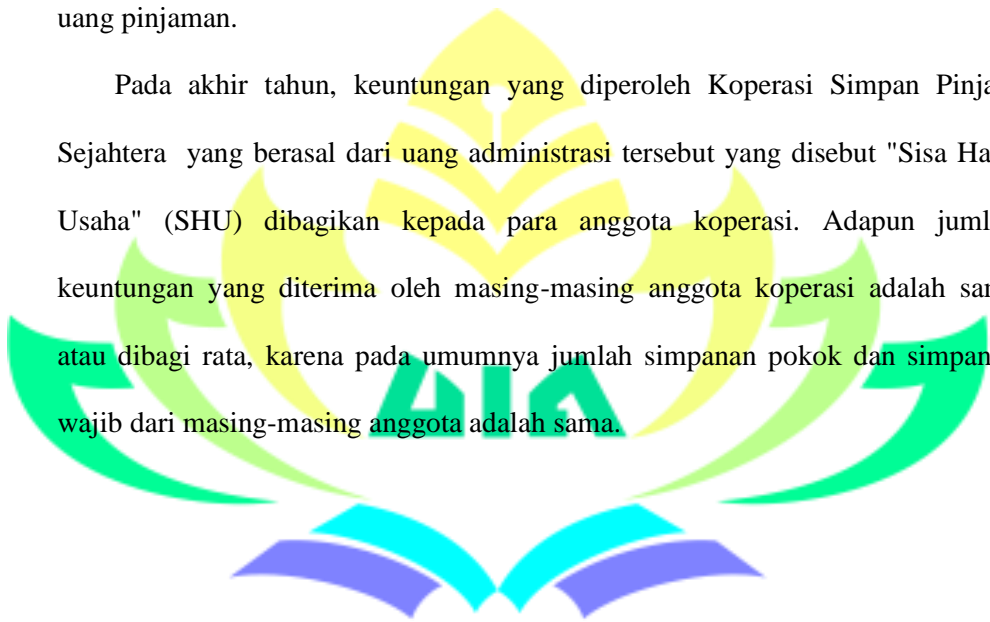
Contoh data Pinjaman Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Tahun 2017 dari yang bukan anggota koperasi dengan mengatasnamakan anggota koperasi sebagai jaminan.

<b>Nama Peminjam (Bukan Anggota)</b>	<b>Nama Anggota Koperasi</b>	<b>Jumlah Pinjaman</b>
Erwin Suhendra	Ramdan Yusuf	Rp. 2.000.000,-
Roni	Tanti Fikasari	Rp. 3.500.000,-
Anggi Ramadhan	Rifqi Ihsan	Rp. 1.500.000,-
Viko Anggara	Sofian	Rp. 3.000.000,-
Jessica Maharani	Rivaldi Putra	Rp. 2.500.000,-
Maharani	Nadila Irza	Rp. 1.000.000,-
Firdaus	Rio Putra Tama	Rp. 1.200.000,-
Permana	Rama Jaya	Rp. 2.500.000,-
Susi Sukmawati	Jovan Saputra	Rp. 1.900.000,-
Annisa	Baddiah	Rp. 2.000.000

Secara umum ruang lingkup kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbetuk penyaluran pinjaman terutama dari dan untuk anggota. Pada perkembanganya memang koperasi simpan pinjam sejahtera melayani tidak saja anggota tetapi juga masyarakat luas.

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera adalah sebuah koperasi yang modalnya diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada para anggota koperasi dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Kepada setiap peminjam, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera menarik uang administrasi setiap bulan sejumlah sekian persen dari uang pinjaman.

Pada akhir tahun, keuntungan yang diperoleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera yang berasal dari uang administrasi tersebut yang disebut "Sisa Hasil Usaha" (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi adalah sama atau dibagi rata, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.



## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### **C. Sistem Peminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)**

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan agar terciptanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Kerja sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama itu.

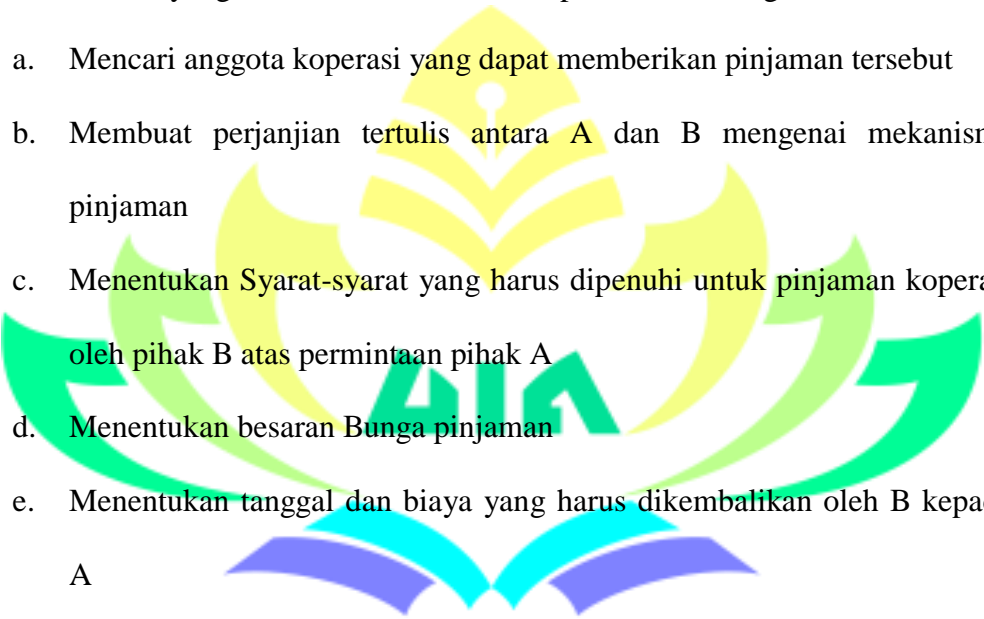
Dalam menjalankan usahanya, koperasi simpan pinjam sejahtera memiliki modal yang terdiri dari:

1. Simpanan Pokok yang dibayarkan pertama kali oleh anggota koperasi dan hanya sekali saja.
2. Simpanan Wajib yang dibayarkan oleh anggota setiap bulannya.
3. Simpanan Sukarela yang mirip seperti tabungan dengan jumlah dan waktu simpanan tidak ditentukan.

Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam sejahtera memberikan pinjaman ke anggota dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam.

Namun bisa juga dengan mengajukan pinjaman melalui anggota koperasi secara pribadi, contohnya Bapak Erwin Suhendra (B) yang bukan anggota koperasi aktif pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera memerlukan

dana sebesar Rp 2.000.000,- untuk kebutuhan mendesak, Bapak Erwin meminjam dana kepada koperasi simpan pinjam sejahtera dengan mengatasnamakan proposal yang dibuat oleh Bapak Ramdan Yusuf (A) yang merupakan anggota aktif pada koperasi tersebut. Peminjaman dapat dicarikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera berdasarkan jaminan kepercayaan yang dilimpahkan kepada anggota aktif koperasi, yaitu Bapak Ramdan Yusuf. Mekanisme yang dilakukan oleh B terhadap A adalah sebagai berikut :

- 
- a. Mencari anggota koperasi yang dapat memberikan pinjaman tersebut
  - b. Membuat perjanjian tertulis antara A dan B mengenai mekanisme pinjaman
  - c. Menentukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pinjaman koperasi oleh pihak B atas permintaan pihak A
  - d. Menentukan besaran Bunga pinjaman
  - e. Menentukan tanggal dan biaya yang harus dikembalikan oleh B kepada A

Sedangkan Mekanisme yang harus dilakukan oleh A adalah dengan melakukan peminjaman secara personal kepada Koperasi tersebut, dan memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan oleh koperasi dan bersiap menanggung segala resiko yang timbul akibat pinjaman tersebut

- 1) Dampak positif dari pinjaman ini adalah :
    - a. Agar sistem koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana
    - b. Agar uang yang ada didalam koperasi tersebut dan berputar
    - c. Masyarakat mampu mendapatkan modal usaha dengan lebih baik
- ketimbang meminjam di rentenir

- d. Terjadi kesejahteraan umum karena mampu mendistribusi kemakmuran dengan lebih baik
- e. Anggota mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jasanya

2) Dampak negatifnya

- a. Tercipta pola ketergantungan yang tinggi antar anggota sehingga tidak mandiri
- b. Pola pikir yang buruk di setiap anggota
- c. Rentan adanya jurang pemisah antara si rajin dan si miskin
- d. Masalah individu berpeluang mengacaukan jalannya operasi koperasi

Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pengkoperasian. Maka dapat disimpulkan bahwa Peminjam yang merupakan bukan anggota koperasi dapat meminjam uang dengan anggota koperasi dengan kesepakatan yang telah ditentukan (dengan kata lain meminjam nama), dengan tujuan agar koperasi itu sendiri dapat berjalan sesuai dengan rencana.

**D. Pandangan Hukum Islam Tentang Sistem Peminjaman Uang Bagi Orang Yang Bukan Anggota Koperasi (Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera)**

Dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 Pasal 91 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman diluar anggota atau dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Kemudian dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 122 butir 2 juga disebutkan bahwa unit koperasi simpan pinjam dilarang



menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota.

Namun dalam tinjauan hukum Islam aturan tersebut tidak sesuai dengan landasan koperasi syariah yang berlandaskan pada asas kekeluargaan serta berlandaskan syariat islam yait Al-Qur'an dan as-sunnah dengan saling tolong menolong.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniah (persetujuan tolong menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar membagi untung menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional.

Pinjam meminjam di dalam Islam merupakan akad tabaru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”. (QS. al-Maidah : 2

Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam koperasi syari'ah ini juga dibagikan seperti koperasi-koperasi secara umumnya, akan tetapi sedikit berbeda dalam

proses penghitungannya. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Dalam koperasi syari'ah berbeda dalam penghitungannya, dalam koperasi ini memasukkan unsur zakat. Zakat ini sendiri dimasukkan setelah dilakukan pengurangan-pengurangan seperti koperasi lain, pemotongan zakat atas Badan Usaha Koperasi dan zakat atas perorangan dilakukan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

##### **1. Sistem Peminjaman Uang Koperasi Simpan pinjam Sejahtera**

Dalam menjalankan usaha, koperasi simpan pinjam sejahtera memberikan pinjaman ke anggota dengan mekanisme yang sudah ditentukan. Pada awalnya koperasi fokus pada anggota saja, baik dalam hal simpan maupun pinjam.

Namun bisa juga dengan mengajukan pinjaman melalui anggota koperasi secara pribadi. Peminjaman dapat dicarikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera berdasarkan jaminan kepercayaan yang dilimpahkan kepada anggota aktif koperasi.

Mekanisme yang dilakukan oleh B terhadap A adalah sebagai berikut :

- f. Mencari anggota koperasi yang dapat memberikan pinjaman tersebut
- g. Membuat perjanjian tertulis antara A dan B mengenai mekanisme pinjaman
- h. Menentukan Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pinjaman koperasi oleh pihak B atas permintaan pihak A
- i. Menentukan besaran Bunga pinjaman
- j. Menentukan tanggal dan biaya yang harus dikembalikan oleh B kepada A

Sedangkan Mekanisme yang harus dilakukan oleh A adalah dengan melakukan peminjaman secara personal kepada Koperasi tersebut, dan

memenuhi segala persyaratan yang sudah ditentukan oleh koperasi dan bersiap menanggung segala resiko yang timbul akibat pinjaman tersebut

3) Dampak positif dari pinjaman ini adalah :

- f. Agar sistem koperasi dapat berjalan sesuai dengan rencana
- g. Agar uang yang ada didalam koperasi tersebut dan berputar
- h. Masyarakat mampu mendapatkan modal usaha dengan lebih baik ketimbang meminjam di rentenir
- i. Terjadi kesejahteraan umum karena mampu mendistribusi kemakmuran dengan lebih baik
- j. Anggota mendapatkan imbalan yang sesuai dengan jasanya

4) Dampak negatifnya

- e. Tercipta pola ketergantungan yang tinggi antar anggota sehingga tidak mandiri
- f. Pola pikir yang buruk di setiap anggota
- g. Rentan adanya jurang pemisah antara si rajin dan si miskin
- h. Masalah individu berpeluang mengacaukan jalannya operasi koperasi.

## **2. Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Orang yang Bukan Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera**

Dalam Undang-undang no. 17 Tahun 2012 Pasal 91 yang mengatur koperasi simpan pinjam, bahwa koperasi Simpan Pinjam dilarang memberikan pinjaman diluar anggota atau dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Kemudian dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 122 butir 2 juga disebutkan bahwa unit koperasi simpan

pinjam dilarang menerima simpanan dan/atau memberikan pinjaman baru kepada non-anggota.

Namun dalam tinjauan hukum Islam aturan tersebut tidak sesuai dengan landasan koperasi syariah yang berlandaskan pada asas kekeluargaan serta berlandaskan syariat islam yait Al-Qur'an dan as-sunnah dengan saling tolong menolong.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal.

Pinjam meminjam di dalam Islam (dalam hal ini koperasi simpan pinjam sejahtera) merupakan akad tabaru' yang bertujuan untuk saling tolong menolong bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa”. (QS. al-Maidah : 2

## B. SARAN

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, sebaiknya mempertegas fungsi dan tujuan dari koperasi tersebut, agar kedepannya koperasi ini lebih menjamin mutu dan kualitas para anggota. Khususnya dalam bagian peminjaman bagi orang yang bukan anggota koperasi, aturan yang ditetapkan oleh koperasi haruslah jelas dan sesuai dengan keadaan saat ini.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih memperjelas atau menambah teori-teori baru yang didapatkan dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), Cet. Ke-3,
- Amir Syarifuddin, *UShul Fiqih Jilid 1 Logos Wacana Ilmu*, Jakarta, 1997,
- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Tintamas: Jakarta, 1985,
- Arifin Sitio, Halomoan Tamban, *Koperasi teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001),
- Burhanuddin S, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya Di Indonesia*, UIN Maliki Press, Cet-2, Malang, 2013,
- Departemen Agama Republik Indonesia. AL-Quran dan Terjemahnya. Jakarta: YPP/Penafsiran AL-Quran,
- Hamzah Ya' cub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung,
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009,
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Diskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003),
- HR. Abu Dawud", *Kitab Al-Buyu dan Hakim No. 2936 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek* (Jakarta : Tazkia Cendikia, Maret 2001), Cet. Ke-1,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid.*, Jilid 4, Pustaka Amani, Jakarta, 1995,

Kanaidi, S. E., M. Si, *Koperasi dan UMKM*, Manajemen Bisnis Politeknik Pos Indonesia, Bandung, 2015,

Muchdarsyah Sinungan, 1991, *Perkoperasian*, Bina Aksara Jakarta,

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah (Islamic Banking) Teori dan Praktek* (Jakarta : Tazkia Cendikia, Maret 2001), Cet. Ke-1,

Murtadha Muttahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995,

Pandji Anoraga, S. E., M. M., Dra. Ninik Widiyawati , *Dinamika Koperasi*, Bina Adiaksara, Jakarta, 2007,

Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 1/ Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta/pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi,

Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004),

Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, 2000,

*Riba dalam bank, Koperasi, perseroan dan asuransi*, PT. Al-Ma’arif Bandung,

Rosnani Siregar, “*Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam*” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padang Sidempuan, Vol 1, No 1, Januari-Juni 2015,

Rudianto, *Akuntan Koperasi*, Edisi ke-2. Jakarta, 2010,

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998,

Suhendra dan Imam Aji, *Masail Fiqhiyah*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1988:148

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar baru Argen Sindo, 1997,

Syamsul Hilal, “*Qawa'id Fiqhiyyah Furu'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*”, Jurnal AL-'ADALAH, Vol. 11, No.2, Juli, 2013, h. 151 (On-Line) tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/252>, (17 Desember 2018)

Syekh Muhammad Qasim Al-Ghizzi, *Fathul Qarib*, Trigenda Karya, Bandung. 1995,

Taqiyuddin An-Nabhani, *Nidham Al-iqtishodi fi Al-islam (Sistem Ekonomi Islam)*, (Dar Al-Ummah : 1425 h/ 2004 m),

Undang-undang Perkoperasian RI No. 17 Tahun 2012,

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1992,